

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual dapat dipahami sebagai sistem pelaporan keuangan di mana suatu transaksi dicatat dan diakui pada saat terjadinya (real time), tanpa bergantung pada penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas. Pencatatan ini mencakup seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi. Pemilihan basis akrual didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan pelaporan keuangan tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan basis kas. Secara khusus, akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mendukung fungsi manajerial dan pengawasan.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga dimaksudkan untuk mengatasi keterbatasan informasi yang dihasilkan oleh basis kas, sehingga data yang disajikan menjadi lebih akurat. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2006:1) menegaskan bahwa laporan keuangan berbasis akrual mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan basis kas. Dengan sistem ini, biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih tepat dan wajar sesuai dengan kebutuhan. Nilai yang dilaporkan tidak hanya berupa jumlah kas, melainkan juga mencerminkan seluruh beban yang muncul pada saat transaksi terjadi.

Keunggulan lainnya adalah pengukuran laporan keuangan menjadi lebih komprehensif, karena mencakup seluruh beban baik yang sudah dibayar maupun yang masih menjadi kewajiban. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual disusun secara tepat waktu dan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban maupun perencanaan ke depan. Informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi juga dapat tercatat dengan baik, sehingga mendukung evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Oleh sebab itu, akuntansi berbasis akrual menjadi instrumen penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintahan. (Lubis & Nurlaila, 2022).

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor pemerintahan merupakan bagian dari tuntutan baik secara global maupun nasional, yang bertujuan utama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kantor Camat Gomo, sebagai salah

satu unit dalam struktur pemerintahan daerah, juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan standar tersebut. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas mengenai landasan teori, regulasi, manfaat, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10), basis akrual adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi serta peristiwa keuangan pada saat terjadinya, tanpa mempertimbangkan kapan kas atau setara kas diterima maupun dibayarkan. Halim juga menegaskan bahwa basis akrual mampu mencapai tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, khususnya dalam hal fungsi manajerial dan pengawasan.

1. Namun, penerapan basis akrual dalam praktiknya tidak terlepas dari sejumlah permasalahan, di antaranya:
2. Penentuan akun serta nilai transaksi yang dicatat dalam jurnal sangat bergantung pada individu pencatat.
3. Relevansi akuntansi berbasis akrual menjadi terbatas jika dikaitkan dengan nilai historis maupun kondisi inflasi.
4. Dibandingkan dengan basis kas, penyesuaian dalam akuntansi akrual menuntut prosedur administrasi yang lebih kompleks, sehingga berimplikasi pada meningkatnya biaya administrasi.
5. Adanya potensi manipulasi keuangan yang relatif sulit untuk diawasi dan dikendalikan.

2.2 Perubahan sistem akuntansi instansi PP 24 tahun 2005 menjadi PP 71 Tahun 2010 atau dari cash toward accrual menjadi accrual basis

a. *Basis Cash toward Accrual (CTA)*

Standar akuntansi pemerintah (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 menggunakan basis modifikasian kas menuju akrual (Cash Towards Accrual) guna menjembatani penerapan basis kas menuju basis akrual kepada basis akrual secara penuh. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas menuju akrual ini melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran (yaitu pendapatan diakui pada saat kas di terima Kas Negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara). Dan pada akhir

periode diperlukan penyesuaian- penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaan (dengan menggunakan metode kolorari), serta mencatat hak ataupun kewajiban negara.

Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK), sedangkan pencatatan pada akhir periode (dengan jurnal kolorari) akan diperoleh Neraca. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur Laporan Realisasi Anggaran. Dengan kata lain, Neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas.(Satya, 2023)

b. Basis Akrual

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual** sebagai standar yang mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam laporan keuangan berbasis akrual. Sementara itu, untuk pelaporan pelaksanaan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN maupun APBD. Penerapan SAP berbasis akrual berlaku bagi seluruh entitas pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun unit organisasi yang berada di bawahnya, sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan (PP No. 71 Tahun 2010).

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaporan keuangan pemerintah menjadi lebih lengkap karena mencakup **dua kelompok laporan utama**, yaitu:

1. **Laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports)** yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
2. **Laporan keuangan finansial (financial reports)** yang mencakup Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).(Putra & Varina, 2021)

Basis akrual bertumpu pada dua prinsip utama, yakni **pengakuan pendapatan** dan **pengakuan beban/biaya**. Dalam sistem ini, pendapatan diakui pada saat pemerintah memperoleh hak untuk menagih hasil dari suatu kegiatan, tanpa menunggu kas benar-benar diterima. Karena itu, kemungkinan munculnya **piutang tak tertagih** tetap ada, mengingat pendapatan sudah diakui meskipun kas belum diterima. Sementara itu, beban atau biaya diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk

membayar. Dengan demikian, momen terjadinya kewajiban tersebut menjadi titik awal pengakuan beban, walaupun pembayaran sebenarnya belum dilakukan.

Tabel 2. 1 Perbandingan antara sistem akrual dan kas

Aspek	Basis akrual	Basis kas
pendapatan	Diakui saat hak atas pendapatan timbul	Transaksi dicatat ketika kas benar-benar diterima.
beban	Diakui saat kewajiban timbul	Diakui saat kas dikeluarkan
laporan	Mencakup LRA, LO, Neraca, dan Arus Kas	Fokus pada LRA
kelebihan	Akurat, komprehensif, sesuai realitas ekonomi	Mudah diterapkan, sederhana
Kekurangan	Rumit, butuh SDM dan sistem yang memadai	Kurang akurat, tidak mencerminkan utang/piutang.

Tabel 2. 2 Contoh basis akrual dan basis

Contoh basis akrual	Contoh basis kas
Transaksi: Gaji pegawai bulan April masih belum dibayarkan hingga akhir bulan (misalnya baru akan dibayar 2 Mei). Beban gaji dicatat di bulan April, saat kewajiban (utang) timbul, meskipun belum dibayar. Jurnal	Transaksi: Gaji pegawai bulan April dibayarkan pada tanggal 2 Mei. Jurnal Tanggal: 2 Mei Beban Gaji xxx Kas xxx Penjelasan: Karena kas baru keluar di

Tanggal: 30 April Beban Gaji xxx Utang Gaji xxx Jurnal Saat dibayar di bulan Mei: Tanggal: 2 Mei Utang Gaji xxx Kas xxx Penjelasan: Pada basis akrual, transaksi dicatat ketika hak atau kewajiban timbul, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan.	bulan Mei, maka meskipun kerja dilakukan di April, pencatatan dilakukan di Mei.
---	---

2.3 Tujuan sistem akuntansi berbasis akrual

Terdapat lima tujuan utama penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, yaitu:

1. **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.** Dengan mencatat seluruh transaksi, baik yang bersifat kas maupun non-kas, sistem ini mampu memberikan gambaran utuh atas aktivitas ekonomi pemerintah. Informasi yang tersaji memperlihatkan bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan kepada masyarakat dan otoritas terkait.
2. **Menyediakan informasi yang lebih menyeluruh.** Sistem akrual menampilkan data mengenai aset, kewajiban, pendapatan, serta beban secara lebih detail dibandingkan dengan basis kas, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi keuangan yang lebih nyata dan akurat.
3. **Menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah.** Dengan adanya pengakuan pendapatan dan beban secara akrual, pemerintah dapat menilai tingkat efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran publik, sekaligus mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. **Mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.** Informasi keuangan yang lengkap dan tepat waktu dari sistem akrual dapat digunakan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga alokasi sumber daya publik menjadi lebih rasional dan terukur.

5. **Mendukung proses pengambilan keputusan.** Data keuangan yang dihasilkan melalui sistem akrual memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan di berbagai level pemerintahan, termasuk pada unit terkecil seperti kecamatan.

2.4 Manfaat sistem akuntansi berbasis akrual

Manfaat penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Memberikan informasi keuangan yang lebih akurat.** Sistem ini mencatat seluruh transaksi serta peristiwa ekonomi pada saat terjadi, termasuk transaksi non-kas seperti piutang, utang, depresiasi aset, maupun amortisasi. Dengan demikian, kondisi keuangan yang ditampilkan mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. **Meningkatkan pengelolaan aset.** Melalui akuntansi akrual, aset tetap seperti gedung kantor camat, kendaraan dinas, dan perlengkapan kerja wajib dicatat, disusutkan, serta dikelola dengan sistematis, sehingga mendorong adanya pengendalian aset yang lebih tertib.
3. **Menunjukkan beban secara lebih realistis.** Contohnya, belanja pegawai maupun belanja barang dicatat sebagai beban pada periode terjadinya, bukan hanya saat pembayaran dilakukan. Hal ini menggambarkan kewajiban fiskal yang sesungguhnya.
4. **Memperkuat disiplin dan pengawasan anggaran.** Karena pencatatannya lebih detail dan komprehensif, sistem akrual memudahkan identifikasi terhadap pemborosan, pengeluaran di luar rencana, maupun potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
5. **Meningkatkan kualitas opini laporan keuangan.** Jika diimplementasikan secara tepat, sistem ini berpotensi memperbaiki mutu laporan keuangan pemerintah daerah dan mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
6. **Menjadi sarana pertanggungjawaban publik.** Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan dana publik. Dengan laporan berbasis akrual, informasi yang disajikan lebih andal dan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban kepada publik.

2.5 Fungsi sistem akuntansi berbasis akrual

Sistem akuntansi berbasis akrual memiliki berbagai fungsi penting dalam tata kelola keuangan pemerintah, antara lain:

1. **Menyajikan informasi keuangan yang menyeluruh.** Sistem ini memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan pemerintah, tidak hanya terbatas

pada arus kas, tetapi juga mencakup aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.

2. **Mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.** Sebagai pilar utama pengelolaan keuangan publik, transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai karena akuntansi akrual menyajikan informasi yang detail, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Menjadi dasar pengambilan keputusan.** Informasi yang dihasilkan dari sistem akrual dapat digunakan untuk perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan atas program maupun kegiatan pemerintahan.
4. **Memudahkan evaluasi kinerja keuangan dan program.** Melalui pendekatan akrual, pemerintah dapat menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mengukur hasil atau output yang dicapai.
5. **Sebagai landasan penyusunan laporan keuangan standar.** Fungsi utama lain dari sistem ini adalah menyediakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010.
6. **Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban.** Dengan pencatatan yang teratur atas aset tetap maupun kewajiban, sistem akrual mendukung pengendalian internal yang lebih efektif.
7. **Memenuhi ketentuan hukum dan regulasi.** Sistem ini juga berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah selaras dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.6 Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Standar akuntansi pemerintah dengan basis akrual telah ditetapkan melalui **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa **tahun 2014 merupakan batas akhir** penggunaan basis kas menuju akrual oleh pemerintah. Selanjutnya, berdasarkan **Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10)**, akuntansi berbasis akrual didefinisikan sebagai standar akuntansi yang mengakui dampak suatu transaksi maupun peristiwa pada saat kejadian tersebut berlangsung, tanpa bergantung pada penerimaan atau pengeluaran kas.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan, antara lain untuk menilai kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan serta memenuhi kewajibannya, sekaligus menggambarkan posisi keuangan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, penerapan akuntansi berbasis akrual

juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya, serta menjadi alat ukur dalam menilai kinerja dari sisi efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, **pemerintah pusat maupun daerah wajib melaksanakan SAP berbasis akrual**, karena diyakini mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan.(Feni Pirani *et al.*, 2023)

2.6.1. Manfaat standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Menurut modul resmi mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang dijelaskan dalam Study Nomor 14 terbitan *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB), implementasi SAP berbasis akrual memberikan berbagai manfaat dalam penyusunan laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan memungkinkan pemangku kepentingan untuk:

- a. Menilai tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan serta distribusi sumber daya publik.
- b. Mengevaluasi kinerja, kondisi keuangan, dan arus kas entitas terkait.
- c. Membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penyediaan maupun kerja sama dalam penggunaan sumber daya.

Lebih lanjut, **Study Nomor 14** menegaskan bahwa laporan keuangan berbasis akrual memiliki sejumlah manfaat khusus, antara lain:

1. Menunjukkan cara pemerintah membiayai aktivitas serta memenuhi kebutuhan pendanaan.
2. Memungkinkan pengguna laporan menilai kemampuan pemerintah dalam membiayai kegiatan saat ini dan memenuhi kewajiban maupun komitmen di masa depan.
3. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pemerintah serta perubahannya.
4. Menjadi sarana bagi pemerintah untuk membuktikan keberhasilan dalam mengelola sumber daya publik.
5. Menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah, terutama dari sisi efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya(Alrahim & Wibowo, 2022)

Secara umum, penerapan SAP berbasis akrual mendukung pemerintah dalam melakukan evaluasi atas laporan keuangan maupun kinerja instansi, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya publik secara lebih baik.

2.6.2. Sistem akuntansi pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan adalah prosedur yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan laporan keuangan pada instansi

pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaannya berlandaskan **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** sebagaimana ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**. SAP sendiri menerapkan dua pendekatan, yaitu **basis kas menuju akrual** dan **basis akrual penuh**. Tujuan utama dari sistem ini ialah menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik, sekaligus menjadi instrumen pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.(Nasution *et al.*, 2024)

Terdapat tujuh rekomendasi penting dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang.

1. **Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan.** Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan, yaitu *big bang* dan bertahap. Model *big bang* memiliki keunggulan berupa mendorong perubahan budaya organisasi, mempercepat tercapainya tujuan, serta mengurangi potensi konflik kepentingan. Namun, kelemahannya adalah tingginya beban kerja, terbatasnya waktu dalam menyelesaikan masalah yang muncul, serta kemungkinan perubahan komitmen politik. Sebaliknya, model bertahap memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah selama masa transisi, serta memberi ruang penggunaan basis kas secara paralel untuk meminimalkan risiko kegagalan.
2. **Komitmen politik sebagai faktor utama.** Dukungan politik yang kuat sangat dibutuhkan agar penerapan basis akrual dapat berjalan konsisten dan tidak terhambat oleh kepentingan yang bertentangan.
3. **Komunikasi mengenai tujuan yang ingin dicapai.** Manfaat dan hasil dari penerapan basis akrual harus disampaikan secara jelas dan berkesinambungan kepada pihak-pihak terkait.
4. **Ketersediaan tenaga akuntan yang kompeten.** Diperlukan akuntan profesional yang cukup melalui proses rekrutmen dan pelatihan. Kekurangan tenaga akuntan dapat menghambat bahkan menunda implementasi basis akrual di sektor pemerintahan.
5. **Sistem informasi akuntansi yang memadai.** Basis kas yang andal menjadi fondasi penting sebelum beralih ke akuntansi berbasis akrual. Negara yang belum memiliki sistem akuntansi kas yang baik harus terlebih dahulu memperkuat sistem dan proses yang ada sebelum melakukan transisi.

6. **Kapasitas lembaga audit tertinggi.** Lembaga audit memiliki peran kunci dalam implementasi akrual. Dibutuhkan sumber daya yang memadai serta waktu beberapa tahun untuk meningkatkan profesionalisme auditor dalam mendukung penerapan ini.
7. **Menjadi bagian dari reformasi birokrasi.** Penerapan basis akrual tidak boleh dianggap sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan harus dipandang sebagai upaya reformasi birokrasi menyeluruh yang menuntut perubahan budaya organisasi.

Lebih jauh, perlu dipahami bahwa entitas pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dengan entitas sektor swasta. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan operasional, di mana pemerintah tidak berorientasi pada laba, melainkan pada penyediaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah mengelola sumber daya publik yang diperoleh dari penerimaan negara atau daerah, seperti pajak, retribusi, dana transfer, maupun hibah dari pihak ketiga. Dengan demikian, keberhasilan entitas pemerintah tidak diukur dari besarnya keuntungan finansial, tetapi dari sejauh mana layanan publik memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2.6.3. Peran akuntansi pemerintah

Akuntansi pemerintahan memiliki kedudukan strategis dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Secara umum, terdapat lima peran utama akuntansi pemerintahan, yaitu:

1. **Sebagai sarana pertanggungjawaban.** Melalui akuntansi pemerintahan, informasi keuangan dapat disajikan kepada publik maupun pihak berwenang sebagai bentuk akuntabilitas atas pemanfaatan anggaran negara atau daerah. Laporan keuangan yang sesuai standar memungkinkan legislatif, eksekutif, maupun masyarakat mengevaluasi apakah dana publik digunakan secara tepat dan efisien.
2. **Sebagai instrumen perencanaan dan pengendalian anggaran.** Data yang dihasilkan akuntansi pemerintahan berfungsi sebagai dasar penyusunan anggaran serta pengendalian pelaksanaannya. Informasi yang akurat memungkinkan perbandingan antara rencana dan realisasi, serta memberikan dasar untuk mengambil tindakan korektif bila terjadi penyimpangan.

3. **Sebagai dasar pengambilan keputusan.** Laporan keuangan yang andal dan relevan membantu pimpinan instansi, pembuat kebijakan, serta legislatif dalam menentukan alokasi sumber daya, menilai efektivitas program, dan mengarahkan pembangunan secara lebih tepat.
4. **Sebagai sarana transparansi dan penerapan *good governance*.** Akuntansi pemerintahan mendukung prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan publik. Informasi yang tersaji secara jelas dan dapat dipercaya meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran.
5. **Sebagai alat evaluasi kinerja keuangan dan program.** Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, pemerintah dapat menilai efektivitas serta efisiensi program melalui laporan keuangan dan laporan operasional yang lebih menyeluruh.

2.7 Laporan keuangan Pemerintah dalam sistem akuntansi berbasis akrual

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan entitas pelapor. Berdasarkan sistem akrual, jenis laporan keuangan yang disusun meliputi:

- a. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA).** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, serta pembiayaan dalam satu periode pelaporan, yang dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. **Neraca.** Laporan ini menggambarkan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang mencakup aset, kewajiban, serta ekuitas dana.
- c. **Laporan Operasional.** Berisi informasi mengenai seluruh aktivitas operasional keuangan yang mencerminkan hak dan kewajiban pemerintah dalam suatu periode, dengan pengukuran berbasis akrual.
- d. **Laporan Arus Kas.** Menyajikan data mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional, investasi, maupun pembiayaan selama periode pelaporan.
- e. **Laporan Perubahan Ekuitas.** Menunjukkan informasi terkait peningkatan atau penurunan ekuitas dalam satu periode pelaporan.
- f. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.** Berfungsi untuk menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih yang terjadi selama periode tertentu.

- g. **Catatan atas Laporan Keuangan.** Berisi penjelasan naratif maupun rincian dari angka-angka dalam laporan keuangan, serta informasi tambahan lain yang relevan untuk mendukung pengungkapan yang wajar.

Penerapan akuntansi akrual dan peraturan perundang-undang keuangan di Indonesia

Pada Sub Bab penerapan akuntansi akrual dan serangkaian peraturan perundang-undang keuangan di Indonesia sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.** Regulasi ini menjadi landasan awal reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk memberikan mandat penerapan **Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.** Aturan ini merupakan tonggak penting yang secara resmi memberlakukan SAP berbasis akrual. Melalui PP ini, seluruh entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan basis akrual. Namun, khusus **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** masih dimungkinkan menggunakan basis kas, sedangkan laporan lain seperti **Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)** wajib disusun dengan basis akrual.
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah.** Permendagri ini memberikan arahan teknis sekaligus jadwal implementasi secara lebih rinci bagi pemerintah daerah, yang mencakup tahapan persiapan, pengembangan kompetensi SDM, penyesuaian sistem, hingga target waktu penerapan penuh. Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten, **Kantor Camat Gomo** juga berkewajiban mengikuti ketentuan ini. (Nasution et al., 2024)

2.8 Langkah-langkah Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo

1. Tahap Persiapan

Sosialisasi kebijakan: Pemerintah Kabupaten melalui BPKAD melakukan sosialisasi terkait kewajiban penerapan SAP berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010). Penyusunan regulasi internal: Camat bersama bendahara membuat SOP pencatatan keuangan berbasis akrual.

2. Penguatan SDM

Pelatihan pegawai: Bendahara pengeluaran, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), dan staf kecamatan mengikuti pelatihan akuntansi akrual.

Pembagian tugas: Menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pencatatan, pelaporan, dan pengawasan.

3. Pengembangan Sistem Informasi

Menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan atau SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) untuk mencatat transaksi berbasis akrual.

Integrasi data aset: Data aset kantor camat (tanah, gedung, kendaraan dinas) dimasukkan ke sistem.

4. Inventarisasi dan Penilaian Aset/Kewajiban

Melakukan pendataan aset tetap (contoh: meja, kursi, komputer, kendaraan dinas).

Menghitung nilai penyusutan aset tetap setiap tahun.

Mencatat kewajiban (misalnya tagihan listrik/telepon yang belum dibayar pada akhir tahun).

5. Pencatatan Transaksi Berbasis Akrual

Contoh:

Pendapatan: Jika kantor camat menerima dana transfer operasional, pendapatan dicatat saat hak diterima meskipun kas belum masuk rekening.

Belanja: Gaji pegawai bulan Desember yang dibayar Januari tetap dicatat sebagai beban tahun berjalan.

Aset: Laptop baru yang dibeli dicatat sebagai aset tetap, bukan hanya belanja barang.

6. Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan

Camat melalui bendahara bertugas menyusun laporan keuangan kecamatan yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** menyajikan realisasi pendapatan serta belanja kecamatan.
- b. **Neraca:** menggambarkan posisi keuangan yang mencakup aset (tanah, bangunan, dan peralatan), kewajiban (utang belanja), serta ekuitas.
- c. **Laporan Operasional (LO):** menampilkan seluruh pendapatan dan beban dengan basis akrual.
- d. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK):** berisi informasi tambahan maupun penjelasan atas angka-angka dalam laporan keuangan.

Selanjutnya dilakukan proses **monitoring dan evaluasi**,

7. Monitoring dan Evaluasi

- a. **Evaluasi internal**, di mana Camat menilai kesesuaian laporan dengan SAP berbasis akrual.
- b. **Audit eksternal**, yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, termasuk laporan keuangan kecamatan.
- c. **Tindak lanjut**, berupa koreksi atau perbaikan sesuai rekomendasi hasil audit.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kantor Camat Gomo berupaya menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan **PP No. 71 Tahun 2010**. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah dinilai berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik utama, yaitu **relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami**. Karakteristik ini menjadi pedoman penting dalam menilai kualitas laporan keuangan instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini, pembahasan pada Bab III akan menelaah sejauh mana penerapan akuntansi berbasis akrual di Kantor Camat Gomo mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan keempat prinsip tersebut:

1. **Relevansi**. Laporan keuangan dianggap relevan apabila informasi yang disajikan dapat membantu pengguna dalam mengevaluasi kondisi masa lalu, saat ini, maupun yang akan datang. Di Kantor Camat Gomo, relevansi tercermin dari LRA dan LO yang menunjukkan realisasi anggaran serta kinerja operasional kecamatan.
2. **Keandalan**. Informasi yang dihasilkan harus bebas dari kesalahan material, tidak menyesatkan, dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari penyusunan laporan sesuai SAP, pencatatan berdasarkan bukti yang sah, serta adanya pemeriksaan internal, meskipun masih perlu ditingkatkan.
3. **Keterbandingan**. Laporan keuangan harus bisa dibandingkan antarperiode maupun antarinstansi. Di Kantor Camat Gomo, laporan keuangan dapat dibandingkan antar tahun anggaran, sehingga tren pendapatan, belanja, dan aset terlihat jelas. Selain itu, perbandingan juga bisa dilakukan dengan kecamatan lain karena menggunakan standar SAP yang sama.
4. **Keterpahaman**. Informasi dalam laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar mengenai aktivitas pemerintah. Laporan Kantor Camat Gomo disusun sesuai format standar SAP, sehingga memudahkan pemahaman bagi aparat, auditor, maupun pemerintah daerah yang membutuhkan data tersebut.

Secara keseluruhan, laporan keuangan Kantor Camat Gomo dapat dikategorikan sudah memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan menurut **PP No. 71 Tahun**

2010. Meski demikian, masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek konsistensi pencatatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas laporan di masa mendatang.

2.9 Penelitian terdahulu

Bagian ini menyajikan uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam topik penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian sebelumnya diharapkan mampu menjadi bahan penjelasan sekaligus referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dipilih:

Tabel 2. 3 Penelitian terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Jenis	Hasil
1.	M, Randy, A, Hasty	2021	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah kabupaten polman	Kualitatif dan data kuantitatif	Hasil penellitian ini menyatakan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2	S, Putra R, Varina	2021	Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota

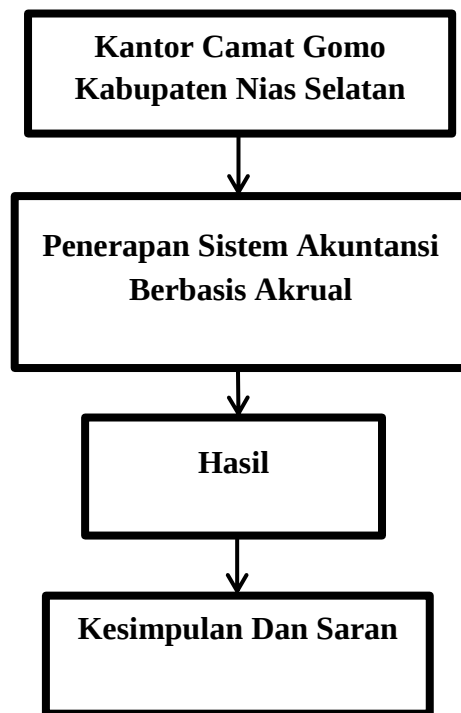
			Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu		Bengkulu, khususnya oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, namun masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola anggaran pada setiap OPD Kota Bengkulu.
3	Alrahim, Abul A'la Wibowo, Puji	2022	Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng	Metode kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna laporan keuangan memanfaatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
4	Feni Pirani Muhamad Rifandi Choirul Anam	2023	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian	Pwendekaktan kuantitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

			Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul		keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,277, sedangkan sistem pengendalian internal dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kabupaten Bantul karena pada uji t nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,008 dan 0,000.
5	Satya, Venti Eka	2023	Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di provinsi jawa barat	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh faktor komitmen pemimpin, regulasi, teknologi informasi dan SDM.

2.10 Kerangka berpikir

Dari penjelasan diatas, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran tentang Penerapan Sitem Akuntansi Berbasis Akrual di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan, yang terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Olahan penulis, 2025

Kerangka berpikir dalam Penelitian ini menunjukkan tahapan Penerapan sistem akuntansi tentang berbasis akrual di Kantor Camat Gomo Kabupaten Nias Selatan. Proses di mulai mengenali Profil instansi, lalu dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang ada, Setelah itu, Peneliti Menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual dan sekaligus menjelaskan perbandingan akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual. Hasil dari Penerapan ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan seberapa efektif sistem yang digunakan. Pada tahap akhir, peneliti memberikan saran-saran perbaikan agar sistem informasi akuntansi terkait berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.